

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Jensen dan Menckling (1976) mengemukakan tentang teori agensi yang mengasumsikan bahwa manajer (agen) memiliki lebih banyak informasi dari pada prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasakan pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil yang aktual perusahaan, dan situasi inilah disebut dengan asimetri informasi yang kemudian dapat memicu timbulnya biaya agensi. Biaya agensi/keagenan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*), biaya bonding (*bonding cost*), dan kerugian residual (*residual loss*).

Sedangkan menurut (Scott, 2003 dalam Tertius & Christiawan 2015) agency theory adalah kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan agen pemiliknya. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, maka

hal tersebut menimbulkan konflik. Pemilik pada umumnya mendelegasikan pengambilan keputusan wewenang kepada agen dan kontrak antara pemilik dan agen merupakan motivasi bagi masing-masing pihak untuk melakukan kinerjanya. Dalam terjadinya masalah keagenan. Akibatnya, menjadi tugas manajer perusahaan dan kepentingan bagi seluruh *stakeholder* untuk meminimalisir konflik kepentingan (Yi Li, 2010 dalam Tertius & Christiawan 2015).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian GCG yaitu hubungan koordinasi yang dilakukan oleh para pengurus perusahaan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya untuk selalu menstabilkan perusahaan agar supaya perusahaan menjadi berkembang maupun maju untuk kedepannya. GCG pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) berusaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme perusahaan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Selain itu, GCG juga menetapkan bagaimana dari para berbagai pemegang saham dan pemangku kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan untuk kedepannya. Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan selalu tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan untuk kedepannya. GCG yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang

sahamnya serta memfasilitasi pengawasan yang efektif (OECD, 2014 dalam Tertius & Christiawan 2015).

2.1.2.1 Prinsip-prinsip Dasar dan *best Practices Good Corporate Governance*

Pada dasarnya asas *Good Corporate Governance* diterapkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemegang saham, para calon investor (*future investors*), pihak kreditor, manajemen, dan karyawan, masyarakat, pemerintah serta kepentingan internal eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Untuk penerapan asas *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian) di perusahaan BUMN perlu terus di mantapkan sehingga benar-benar menjadi budaya korporasi BUMN.

a) *Transparency (Transparansi)*

Penerapan asas transparansi akan memudahkan pengawasan terhadap berbagai tindakan yang diambil oleh para anggota direksi dan komisaris. Perusahaanpun terikat untuk berkewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja selama ini. Pada umumnya, kelemahan dari penerapan asas transparansi ini terkadang disebabkan oleh fakta bahwa para pemegang saham tidak terlalu berminat untuk mengetahui informasi secara mendalam mengenai suatu perusahaan dan lebih sering menanamkan uangnya hanya berdasarkan pada laporan keuangan yang ada, yang sangat mudah untuk direkayasa dan tidak mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, efektifitas penerapan atas transparansi harus didukung oleh peran aktif para pemegang saham dalam menjalankan haknya.

b) Accountability (Akuntabilitas)

Prinsip dasar dari sebuah badan hukum perusahaan adalah pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengawasan perusahaan. Sebagai akibatnya, terjadi pemisahan wewenang antara pemegang saham dengan dewan direksi dalam menjalankan perusahaan, sehingga pada saat sebuah perusahaan berdiri, wewenang pemegang saham untuk menjalankan usahanya menjadi hilang dan diganti dengan adanya tanggung jawab terbatas atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Dengan demikian, asas akuntabilitas memiliki peranan penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan organ perusahaan dengan para pemegang saham.

c) Responsibility (Tanggung Jawab)

Keuntungan lain yang perlu diwujudkan bagi para pemegang saham adalah terciptanya nama baik (reputasi) perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. Asas responsibility merupakan perwujudan dari tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen.

d) Fairnes (Keadilan)

Bagi para pemegang saham kepentingan mendasar lainnya adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan, baik

pemegang saham mayoritas ataupun minoritas, asing atau domestik. Perlindungan dan persamaan ini terutama ditujukan pada pemegang saham minoritas, mengingat kedudukannya sering kali berada dalam posisi yang lemah dan perlu dilindungi.

2.1.2.2 Sistem Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia dilakukan oleh lembaga Independen yaitu : *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI).

Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui metode rata-rata tertimbang, dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut :

- a. Hak-hak pemegang saham, mempunyai bobot presentase sebesar 20%.
- b. Kebijakan *Corporate Governance*, mempunyai bobot presentase sebesar 15%.
- c. Praktek-praktek *Corporate Governance*, mempunyai bobot presentase sebesar 30%.
- d. Pengungkapan (*Disclosure*), mempunyai bobot presentase sebesar 20%.
- e. Fungsi audit, mempunyai bobot presentase sebesar 15%.

2.1.2.3 Praktek-praktek *Good Corporate Governance*

Dalam bidang praktek *Good Corporate Governance*, dapat diteliti apakah di dalam perusahaan telah :

- a. Direksi mengadakan pertemuan berkala secara teratur dengan komisaris.
- b. Terdapat rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan.

- c. Direksi dan komisaris mendapatkan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya.
- d. Para anggota komisaris maupun direksi telah bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interests*).
- e. Ada sistem penilaian kinerja untuk direksi maupun komisaris.

2.1.3 Kinerja Perusahaan

Ukuran Penilaian kinerja adalah suatu organisasi yang melakukan operasional perusahaan secara periodik efektivitas pada bagian struktur perusahaan dan karyawan berdasarkan tujuan, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dapat berupa pengukuran keuangan dan non keuangan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, misalnya *price earning ratio* (PER), *market-to-book ratio* dan *Tobin's Q*. Masing-masing rasio memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan informasi bagi manajemen maupun investor mengenai hal yang berbeda pula. Rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan suatu perusahaan seperti misalnya terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam akuisisi dan kebijakan pendanaan, deviden dan kompensasi (Darmawati, 2006 dalam Hapsari 2011). *Tobin,s Q* merupakan ukuran penilaian yang paling banyak digunakan dalam data keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

2.1.4 Pengaruh Penerapan GCG terhadap Kinerja Perusahaan

Suatu perusahaan menentukan kinerja keuangan ditentukan oleh sejauh mana keseriusannya menerapkan *good corporate governance*. Sebanyak 25 perusahaan telah masuk dalam peringkat teratas yang menerapkan *good corporate governance* dengan baik secara tidak langsung menaikkan nilai sahamnya Purwani (2010). Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri, umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak pada kinerjanya.

Dalam penelitian Purwani (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang telah *go public* di pasar modal yang sedang berkembang (*emerging market*), secara khusus, penelitian ini menguraikan tentang evolusi dari *corporate governance* dan kinerja perusahaan dalam pasar yang sedang berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Adapun tingkat penerapan *corporate governance* dalam penelitian ini merupakan hasil pemeringatan yang dilakukan oleh *Polish Corporate Governance Forum*, dimana

terdapat sedikitnya sembilan indikator yang digunakan sebagai pengukur, yaitu : komposisi dan kompetensi dewan pengawas dan anggota dewan independen, pengawasan yang mencakup beberapa bagian, akses rapat umum pemegang saham, fungsi dari manajemen, auditor independen, regulasi dalam aktivitas jual beli saham, tujuan, visi, misi perusahaan, dan transparansi dalam penyampaian informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dalam mengoperasionalkan dananya untuk kemajuan perusahaan. Ukuran perusahaan adalah salah satu tolok ukur yang menunjukkan ukuran perusahaan adalah total aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *log total asset* (El-Chaarani, 2014 dalam Tertius & Christiawan 2015). Ukuran perusahaan di ukur dengan melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Asset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan perusahaan, dimana profitabilitas yang dimaksud yaitu untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menanamkan dana kedalam aktiva perusahaan sebagai operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam penelitian Sukandar & Rahardja (2014).

2.1.6 Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan dan bertanggung jawab, bahwa

perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika seorang direksi lalai dalam menjalankan tugasnya maka akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan, dan direksipun harus segera mengambil tindakan untuk mencegah timbul ataupun berkelanjutan kerugian tersebut.

2.1.7 Dewan Komisaris

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan mengenai kebijakan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan tugas perseroan yang sesuai dengan anggaran dasar. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris hanya dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis laporan yang diterima dari direksi mengenai hasil yang diberi sesuai dengan pekerjaannya, dan termasuk laporan akuntan yang dibuat oleh akuntan publik. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham. Oleh karena itu komisaris harus berkomitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggung jawab.

2.1.8 Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan

kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris.

2.1.9 Karyawan Perusahaan

Karyawan didalam suatu perusahaan adalah orang yang memberikan jasa kepada perusahaan yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut, karyawan dapat memperoleh balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya. Berdasarkan statusnya, karyawan dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu yaitu dengan mereplikasi hasil yang didapat oleh peneliti, dan juga sebagai bahan pembandingan anantara hasil yang diperoleh oleh peneliti dengan hasil dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Penulis/Tahun	Jurnal Penerbit	Tahun	Variabel yang diterapkan	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi kasus Perusahaan Manufaktur di BEI)	Jurnal Rika Oktaria, Rizal Effendi, Christina Yunita W, Jurusan S1 Akuntansi, STIE Multi Data Palembang	2014	Menggunakan variabel Dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan. Pada kinerja keuangan ini minimum yang diperoleh sebesar 0,84, nilai maksimum yang diperoleh sebesar 34.55, nilai mean yang diperoleh sebesar 8.6130, dan standar devisiasi yang diperoleh sebesar 10.13703	Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : <ul style="list-style-type: none">- Terdapat pengaruh signifikan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan secara persial- Tidak terdapat pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan secara persial- Tidak terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan secara persial dengan nilai signifikan 0,085

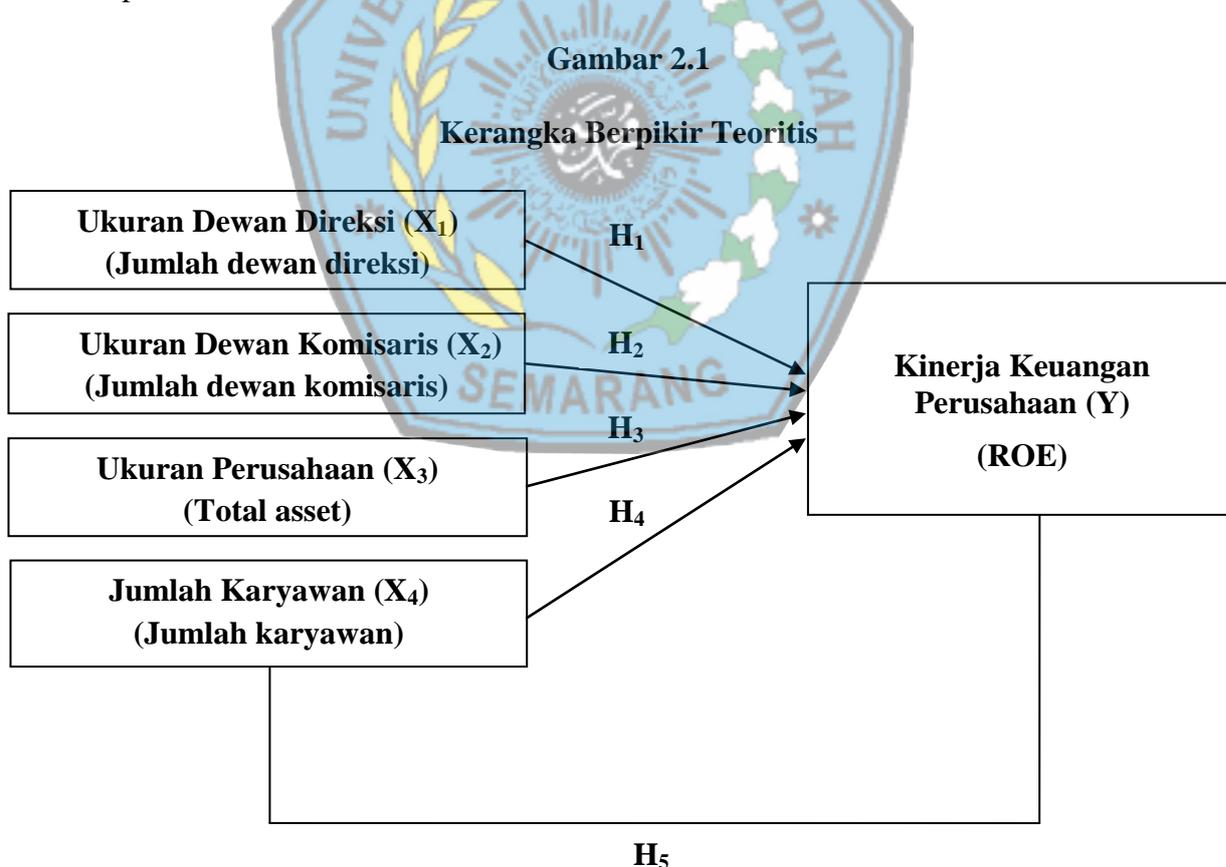
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengaruh signifikan GCG, CSR, dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan secara simultan
2.	<p>Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>. Kesempatan Tumbuh dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan</p>	<p>Jurnal Maryati, Tjahji Dwinirti Drs., MM, Jurusan Akuntansi, Fakultas ekonomi, Universitas Gunadarma</p>	2010	<p>Variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen (Y) yaitu kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE, ROA, dan ROI</p>	<p>Hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> yang diukur menggunakan <i>Corporate Governance perception Index (CGPI)</i> berpengaruh terhadap <i>return on equity</i>. Secara persial <i>Good Corporate Governance</i>, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan signifikan mempengaruhi ROE - Hasil pengujian yang kedua menunjukkan bahwa penerapan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara persial <i>Good Corporate Governance</i>, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan tidak

					<p>berpengaruh signifikan terhadap ROA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengujian yang ketiga menunjukkan bahwa penerapan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap ROI. Secara persial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ROI adalah kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan
3.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada sektor Keuangan	Jurnal Melia Agustina Tertius, Yulius Jogi Chritiawan, SE.,M.Si,Ak, Akuntansi Bisnis, Universitas Kristen Petra	2015	Penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel deoenden dan variabel independen. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu variabel independen antara lain dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA
4.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2010)	Jurnal Iqbal Bukhori, Raharja, Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, universitas Diponegoro	2012	Penelitian ini menggunakan dua jenis Variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dan analisis kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan hasil penelitian secara persial yaitu dewan direksi memiliki

					probabilitas signifikansi sebesar $0,265 > 0,05$, dewan komisaris sebesar 0,116, dan ukuran perusahaan sebesar 0,550.
5.	Pengaruh Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan	Jurnal Isnin Hariati, Yeny Widya P., DBA.,Ak.,CA	2015	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen	Hasil analisis data yang telah dilakukan, yaitu bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan positif kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.
6.	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur Sektor <i>Consumer Good</i> yang terdaftar di BEI 2010-2012)	Panky Pradana Sukandar, Rahardja	2014	Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.	Hasil analisis data yaitu Ukuran dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan adalah ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan nilai <i>ysng</i> signifikan 0,254, Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan nilai <i>ysng</i> signifikan 0,000. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh yang dengan nilai signifikan 0,510.

2.3 Kerangka Berpikir Teoritis

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu lebih dari dua, maka untuk model konseptual peneliti membuat penyusunan tentang bagaimana variabel independet berpengaruh dengan variabel dependen. Jadi kerangka berpikir dibawah ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Setelah dideskripsikan selanjutnya dianalisis secara sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Dan sintesa tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis.



2.4 Perumusan Hipotesis

Struktur dapat didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi untuk melakukan fungsi ataupun kegiatan-kegiatan yang berbeda. Struktur merupakan suatu bentuk kerangka dasar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada agar dapat digunakan, bekerja dan melaksanakan suatu fungsi. Struktur *Corporate Governance* merupakan suatu gambaran dari perusahaan untuk hubungan berbagai kepentingan, baik itu internal maupun eksternal didalam perusahaan. Suatu perusahaan gambaran dari *Corporate Governance* berguna dalam menentukan arahan yang strategis, dalam kinerja sistematis dan pengawasan kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang dibagi ke dalam dua struktur, merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut (Gray and Radebaugh, 2009 dalam Bukhori & Raharja 2012). Pertama adalah struktur mekanisme pengendalian internal perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme internal ini adalah agent dan principal yang terdiri komposisi *board of directors* dan *executive* manajer di dalam perusahaan. Yang kedua adalah struktur mekanisme pengendalian eksternal. Struktur mekanisme pengendalian external terdiri dari stakeholder yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan antara lain Pasar Modal, Pasar Uang, Auditor, Paralegal dan regulator. Struktur mekanisme pengendalian eksternal merupakan mekanisme pengendalian yang dibentuk pihak dari luar perusahaan.

2.4.1 Ukuran Dewan Direksi (X_1)

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melakukan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direksi utama adalah setara. Tugas direksi utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif.

H_1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris (X_2)

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjebatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan. KNKG (*Komite Nasional Kebijakan Governance*) dalam Adestian Yuda (2015) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan *Good Corporate Governance (GCG)*.

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.3 Ukuran Perusahaan (X₃)

Perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar asset total yang dimiliki perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan, mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya (Theacini dan Wisadha, 2014 dalam Adestian 2015).

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.4 Jumlah Karyawan (X₄)

Karyawan adalah orang yang bekerja didalam suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan dan kesepakatan bersama (Dewi, 2012). Sedangkan menurut (Malayu Hasibun, 2003 dalam Dewi 2012) mendefinisikan karyawan sebagai penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2012 yaitu pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dengan variabel independen yaitu pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, dan variabel dependent yaitu kinerja karyawan dengan indikator-indikator penilaian kinerja yaitu efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif (Suryadi, 2008 dalam Dewi, 2012).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel yang berbeda dengan variabel independen yaitu jumlah karyawan, dan variabel dependent yaitu kinerja keuangan perusahaan.

H₄ : Jumlah karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₅ : Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan jumlah karyawan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan.